BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di awal perkawinan setiap pasangan memimpikan rumah tangganya berlangsung untuk jangka waktu yang lama, sampai kakek-nenek bahkan berlangsung selama-lamanya sampai ajal menjemput. Inilah yang didambakan setiap pasangan yang menikah demi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan dan mendapatkan anak, setelah masing-masing pasangan melakukan peran-peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Melalui perkawinan inilah manusia kemudian memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah keluarga mereka. Perkawinan bukan semata untuk kebutuhan biologis melainkan juga untuk memperoleh ketenangan batin dari masing-masing pasangan.

Namun, tidak setiap rumah tangga berjalan mulus, kadangkala dalam menjalankan rumah tangganya menemui rintangan dan permasalahan. Hal ini sudah lazim terjadi pada setiap rumah tangga. Bahkan bagi orang yang belum menikahpun juga akan menemui berbagai permasalahan, apalagi bagi mereka yang sudah menikah yang harus menyatukan dua pikiran menjadi satu. Bagi pasangan yang dapat melewati

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), hal. 10.

permasalahan ini menjadikan bangunan rumah tangga mereka semakin kokoh, namun bagi mereka yang tidak dapat melaluinya memilih mengambil jalan lain, seperti perceraian.

Salah satu hal yang dapat timbul dari perkawinan adalah adanya perceraian. Perceraian diambil sebagai salah satu jalan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang muncul setelah perkawinan terjadi. Bisa saja pasangan bercerai setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga atau bahkan dalam jarak beberapa bulan.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Perceraian bisa dialami oleh setiap pasangan yang menikah, baik cerai hidup, cerai mati, ataupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian bisa disebabkan oleh banyak hal, baik permasalahan dalam rumah tangga ataupun faktor internal yang menyebabkan pasangan mengambil keputusan untuk bercerai. Seperti masalah ekonomi, pertengkaran, wanita/lelaki idaman lain, perbedaan pandangan hidup, hingga masalah penyesuaian diri masing-masing pasangan.

Atas kemungkinan terjadinya perkawinan yang putus di tengah jalan, Islam sebagai agama yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia telah memberi jalan yakni dengan *thalaq*. *Thalaq* menurut bahasa adalah menceraikan atau melepaskan. Pengertian *thalaq* menurut *fiqih*

adalah *talak*, yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian terhadap istri.² *Thalaq* ini dijatuhkan atas kehendak suami terhadap istrinya. Sedangkan bila yang menghendaki terjadinya perceraian dari pihak istri disebut dengan *khuluk*.

Meskipun perceraian itu merupakan suatu tindakan yang menghancurkan bangunan keluarga, tetapi dalam ajaran Islam, bahwa kehancuran tersebut merupakan kehancuran yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat memelihara kondisi batu pada pondasi keluarga untuk selanjutnya dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang sesuai tanpa memecahkannya atau mengabaikannya.³ Seseorang yang telah bercerai, baik laki-laki maupun wanita berhak untuk membangun kehidupan rumah tangganya lagi. Dengan demikian, baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.

Dalam perceraian dikenal adanya masa *iddah* bagi wanita atau mantan istri. Masa *iddah* yakni masa tunggu yang harus dijalani wanita setelah terjadi perceraian. Seorang wanita menunggu atau menanggungkan perkawinan setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Pengertian dari waktu tunggu atau masa *iddah* itu sendiri adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dimana dalam waktu tersebut seorang suami boleh merujuk dan kembali dengan

² Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa, 1981), hal. 8

³ Butsainah as-Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 1996), hal. 202.

isterinya.⁴ Masa *iddah* wajib dijalani seorang wanita selama beberapa waktu tertentu sesuai dengan penyebab atau kondisi isteri pada saat terjadi perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁵

Setelah melewati masa *iddah* yang ditetapkan, seorang wanita diperbolehkan untuk menikah lagi. Hanya saja, terkadang dalam kondisi tertentu, KUA berbeda pemahaman mengenai masa *iddah* yang ditetapkan. Apabila perkawinan tersebut oleh KUA dianggap masih dalam masa *iddah*, maka akan dikeluarkan penolakan perkawinan. Penolakan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh KUA tidak semua didasarkan atas realitas hukum yang terjadi atas para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, boleh jadi penolakan itu didasarkan atas pemahaman bunyi

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 120.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (t.k.: Permata Press, 2004), hal. 46.

tekstual pasal dalam aturan yang tanpa dibatasi dengan pemahaman atas pasal yang ada pada peraturan yang lain.

Sebagai contoh, argumentasi penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, karena janda hamil, meskipun kehamilan janda tersebut dengan laki-laki lain dalam arti hamilnya janda bukan dengan mantan suami yang telah menceraikannya, padahal senyatanya masa *iddah* dengan suami yang menceraikannya telah berlalu.

Penolakan KUA tersebut semata-mata hanya didasarkan atas pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana pasal tersebut mengatur tentang wanita-wanita yang dilarang dikawini oleh seorang pria di antaranya adalah wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain maupun wanita tersebut masih dalam masa *iddah* dengan pria lain. Karena adanya penolakan perkawinan oleh KUA tersebut, seseorang tidak dapat mendaftarkan perkawinannya dan oleh karena itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabut penolakan perkawinan KUA. Dalam permohonan tersebut, hakim akan menilai dengan melakukan pemeriksaan serta pembuktian yang ada untuk menetapkan putusan terhadap penolakan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini. Maka, peneliti mengambil judul **“Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Permohonan Pencabutan Penolakan**

Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum KUA Kedungwaru dalam penolakan perkawinan wanita hamil ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam permohonan perkara penolakan perkawinan oleh KUA Kedungwaru Tulungagung dalam putusan No 287/Pdt.P/2017/Pa.Ta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian di atas adalah

1. Mendiskripsikan pertimbangan hukum KUA Kedungwaru dalam penolakan perkawinan wanita hamil.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara penolakan perkawinan oleh KUA Kedungwaru Tulungagung dalam putusan No 287/Pdt.P/2017/Pa.Ta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis/akademik

Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat atau khalayak umum mengenai penolakan perkawinan

2. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan secara praktis dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat langsung antara lain:

- a. Bagi pihak KUA Kedungwaru dapat menambah pengetahuan serta informasi terkait dengan masa *iddah* dan penolakan perkawinan.
- b. Bagi Pengadilan Agama dapat menjadi bahan informasi mengenai permasalahan penolakan perkawinan yang terjadi di masyarakat.
- c. Masyarakat baik yang sudah mengalami permasalahan serupa atau belum terkait penolakan perkawinan dapat memperoleh informasi secara jelas sehingga dapat menyikapi dengan baik.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Peneliti menegaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini, supaya pembahasan ini lebih fokus ke pokok bahasan, yakni:

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.⁶

b. Permohonan

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁷

c. Penolakan perkawinan

Penolakan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PPN KUA, apabila PPN berpendapat

⁶Damang, Definisi pertimbangan hukum, <http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum-17.html> diakses pada 2 Nopember 2017 pukul 20.20

⁷Tokimaci, Pengertian Gugatan dan Permohonan, <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/> diakses pada 2 Nopember 2017 pukul 20.35

bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut UUP.⁸

d. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁹

e. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/Pa.Ta

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).¹⁰

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/Pa.Ta merupakan penetapan mengenai pencabutan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan beberapa penegasan konseptual tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Permohonan Pencabutan Penolakan

⁸Dulkadir, *Perkawinan*, <http://gudangilmuhukum.blogspot.co.id/2010/08/perkawinan.html> diakses pada 2 Nopember 2017 pukul 20.45

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama diakses pada 2 Nopember 2017 pukul 20.50

¹⁰Jogal, *Pengertian Dan Macam-Macam Penetapan*, <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-penetapan/> diakses pada 27 Nopember 2017 pukul 22.13

Perkawinan dari KUA Kedungwaru Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan No 287/Pdt.P/2017/Pa.Ta)” adalah pertimbangan hukum baik yuridis maupun sosiologis yang digunakan oleh KUA Kedungwaru dalam penolakan perkawinan serta pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara permohonan pencabutan penolakan perkawinan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I yang merupakan pendahuluan yang mencakup antara lain: Konteks penelitian, di dalamnya memuat penjelasan tentang mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan dikaji lebih dalam. Fokus penelitian, pada bagian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai rumusan yang akan dipaparkan. Kemudian tujuan penelitian yang berisi tujuan penelitian ini dibuat, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya penegasan istilah yang memuat penjelasan singkat tentang fokus bahasan. Selanjutnya sistematika pembahasan, pada bagian ini penulis menjabarkan bab-bab yang akan dibahas pada keseluruhan skripsi, dan merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca.

BAB II berisi kajian teori yang menguraikan kajian umum mengenai perkawinan baik pengertian, rukun dan syarat sah perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, masa *iddah*, penolakan perkawinan, perkawinan wanita hamil, pemeliharaan anak serta teori tentang hukum. Dalam bab ini juga menguraian penelitian terdahulu dari peneliti sebelumnya baik dari uraian hingga perbedaannya.

BAB III berisi metode penelitian baik jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, telaah pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV yakni hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan apa saja pertimbangan hukum KUA dalam menolak perkawinan serta apa saja pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan pencabutan penolakan perkawinan wanita hamil.

BAB V berisi tentang penutup dan kesimpulan hasil penelitian, serta saran untuk berbagai pihak sebagai acuan dan tindak lanjut selanjutnya.